

KPU dan Dinkes DKI Petakan TPS yang Petugasnya Rawan Sakit

JAKARTA (IM) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta bakal memetakan lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) rawan petugas sakit pada Pemilu 2024.

Kepala Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU DKI Jakarta, Dody Wijaya mengatakan, jajarannya dan Dinkes DKI Jakarta telah membuat klasifikasi hasil pemeriksaan kesehatan untuk setiap petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Pemeriksaan kesehatan ini menjadi salah satu syarat wajib bagi setiap warga yang ingin mendaftar sebagai KPPS Pemilu 2024.

"Jadi hasil pemeriksaan kesehatan akan ada tiga. Sehat, sehat dengan catatan, dan tidak sehat. Kalau tidak sehat tidak bisa menjadi anggota KPPS," ujar Dody kepada wartawan Selasa (19/12).

Hasil seleksi KPPS yang berlangsung 11-20 Desember

2023 ini nantinya dijadikan data untuk memetakan lokasi TPS yang memiliki petugas berstatus sehat dengan catatan. Dengan begitu, lanjut Dody, KPU dan Dinkes DKI dapat memantau kondisi petugas tersebut selama pemungutan dan penghitungan suara.

"Hasil pemeriksaan kesehatan ini nanti menjadi peta atau database atau dashboard TPS yang rawan petugas sakit. Bagi yang sehat dengan catatan, yang perlu atensi, itu akan menjadi monitor dari Dinas Kesehatan," kata Dody.

Sebelumnya, Dinkes DKI Jakarta disebut akan menyediakan ambulans gawat darurat beserta tenaga kesehatan (Nakes) di setiap kecamatan untuk menunjang Pemilu 2024. KPU DKI Jakarta menyambut baik penyediaan fasilitas tersebut. Harapannya, para petugas KPPS bisa langsung mendapatkan pelayanan ketika mengalami gangguan kelelahan. ● yan

4 | Metropolis

Warga Eks Kampung Susun Bayam Patungan Beli Bensin Genset demi Dapat Listrik

Sebanyak 64 kepala keluarga (KK) warga eks Kampung Bayam memaksa masuk dari pelataran ke hunian Kampung Susun Bayam (KSB), Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Mereka memasuki hunian KSB pada 28 November setelah beberapa bulan tinggal di pelataran.

JAKARTA (IM) - Warga eks Kampung Bayam terpaksa urunan bensin genset demi mendapatkan aliran listrik di Kampung Susun Bayam (KSB). Aliran listrik dibutuhkan terutama oleh anak sekolah yang harus mengerjakan pekerjaan rumah setiap malam.

"Ya kami berupaya. Sekarang tanpa ada listrik, ya kami ada genset. Dengan keterbatasan ekonomi, kami patungan. Iya, swadaya warga. Inilah di sini, sangat miris," kata Ketua Kelompok Tani Kampung Bayam, Madani, Furqon (45), Selasa (19/12). Biasanya, genset tersebut

beroperasi mulai dari pukul 19.00 WIB hingga 06.00 WIB atau sampai bensin habis. Bukan hanya listrik, warga eks Kampung Bayam yang berhuni di KSB ini juga mengaku kesulitan air bersih. "Dulu kami ambil dari WC komunal. Tapi, sama keamanan JIS tidak diperbolehkan. Bahkan, kami tampung di ember saja, ditumpahkan. Akhirnya di sebelah barat itu ada air keran di dekat proyek, kami pergunakan itu," ujar Furqon.

Sebanyak 64 kepala keluarga (KK) warga eks Kampung Bayam memaksa masuk dari pelataran ke hunian Kampung Susun Bayam

(KSB), Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Mereka yang mengatasnamakan Kelompok Tani Kampung Bayam Madani itu mulai memasuki hunian KSB pada 28 November setelah beberapa bulan terakhir, yakni 13 Maret 2023, tinggal di pelataran. Kelompok Tani Kampung Bayam berbeda dengan sejumlah warga eks Kampung Bayam yang telah direlokasi dari tenda darurat mereka yang berdiri di depan Jakarta International Stadium (JIS) ke Rusunawa Nagrak.

Diberitakan sebelumnya, PT Jakarta Propertindo (Jakpro) memastikan belum memberikan izin kepada warga

yang saat ini disebut telah menghuni Kampung Susun Bayam (KSB), Jakarta Utara. "Kami menegaskan bahwa, hingga kini belum memberikan izin bagi eks warga kampung bayam untuk menempati hunian," ujar Direktur Utama (Dirut) PT Jakpro, Iwan Takwin dalam keterangan tertulis, Senin (18/12).

Saat ini, Jakpro tengah mencari konsep pengelolaan yang matang dan legal untuk hunian Kampung Susun Bayam. Iwan berharap, warga tak memaksakan kehendak untuk tinggal di Kampung Susun Bayam tanpa adanya keputusan dari pihak berwenang. ● yan

2.268 ASN Pemkab Bekasi Mengikuti Uji Kompetensi

KABUPATEN BEKASI (IM) - Sebanyak 2.268 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mengikuti uji kompetensi yang diperuntukkan bagi pejabat pengawas, administrator, fungsional, serta pejabat pelaksana mulai 18-21 Desember 2023.

"Kegiatan assessment ini dilakukan di beberapa titik masih di kompleks pemda, di aula Diskominfo, Gedung Swatantra Wibawa Mukti, Ruang Rapat Kyai Haji Raden Ma'mun Nawawi, dan Kantor BPBD Kabupaten Bekasi," kata Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Dedy Supriyadi saat meninjau kegiatan, Senin (19/12).

Dia mengatakan uji kompetensi dilakukan untuk mengukur pematangan kemampuan aparaturnya sekaligus upaya meningkatkan kualitas hingga

penunjang karir bagi ASN di Kabupaten Bekasi.

"Mulai hari ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi melaksanakan uji kompetensi bagi jabatan fungsional dan pengawas maupun administrator. Assessment ini wajib karena sudah menjadi instruksi dan perintah dari Pak Penjabat Bupati Bekasi," katanya.

Ia mengatakan pelaksanaan uji kompetensi ini dilaksanakan bertahap selama empat hari terhitung hari ini dengan peserta kurang lebih sebanyak 600 per hari.

Melalui kegiatan ini, tim penilai dapat mengukur kemampuan para aparaturnya yang kemudian dapat dijadikan acuan jenjang karir mereka ke depan. Selain itu juga dalam rangka optimalisasi sistem merit yang sejauh ini telah diterapkan. ● yan

Menteri BUMN Erick Thohir Dukung Pers Semakin Profesional dengan UKW

JAKARTA (IM) - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mempercayai bahwa wartawan adalah bagian utama industri pers yang akan bekerja secara profesional. Atas profesionalitasnya itu maka pemerintah dan industri lain, termasuk BUMN, sangat memperhatikan industri pers.

Salah satu bentuk perhatian itu antara lain diberikan oleh Kementerian BUMN dan jajaran BUMN dalam bentuk dukungan penyelenggaraan Uji Kompetensi Wartawan (UKW).

Dukungan tersebut juga diberikan dengan harapan industri pers tetap mampu membaca dengan tajam setiap fakta di lapangan, tanpa menyakitkan atau melukai.

Erick menyadari bahwa saat ini merupakan era keterbukaan informasi di mana setiap informasi tersedia secara terbuka. Sebagai pilar kecepatan demokrasi, pers berperan penting sebagai mitra pemerintah dan industri lain dalam mengabarkan atau melakukan koreksi yang membangun.

"Posisi media menjadi penting sebagai mitra pemerintah dalam memberikan edukasi dan membuat khalayak menjadi semakin terliterasi



dengan baik," ujar Erick.

Kementerian BUMN memberikan dukungan kepada PWI Pusat untuk melaksanakan UKW yang akan dilaksanakan di 38 Provinsi dan satu Daerah Khusus Solo.

Dukungan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri BUMN, Erick Thohir kepada Ketua Umum PWI Pusat, Hendry Ch Bangun didampingi Sekjen PWI Pusat, Sayid Iskandaryah, Direktur UMKM PWI Pusat, Syarif Hidayatullah, juga Ketua Umum Forum Humas BUMN, Agustya Hendy Bernadi, di Gedung Kementerian

BUMN, Jakarta, Senin, (18/12) sore.

Atas dukungan yang diberikan oleh Kementerian BUMN tersebut, PWI Pusat menyambut gembira, di mana Kementerian BUMN dengan cepat mengimplementasikan dukungan untuk pelaksanaan UKW tersebut.

"Ini artinya Kementerian BUMN mendukung program peningkatan kompetensi, peningkatan wawasan dan pelatihan bagi anggota-anggota PWI," kata Hendry,

Ketua Umum PWI Pusat berharap, dukungan ini akan terus ber-

langsung di samping itu pula secara teknis akan dibicarakan tata cara pelaksanaannya UKW yang akan berlangsung di 38 provinsi ditambah satu daerah khusus.

Ia juga menyebutkan, pelaksanaan UKW ini akan dimulai pertama kali di Aceh, pada 22-23 Desember 2023. Kemudian minggu berikutnya akan dilaksanakan di Sulawesi Utara dan Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Lampung, Papua Barat Daya, Papua Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara serta beberapa PWI provinsi yg dalam proses pendataan peserta.

"Diharapkan pelaksanaan UKW ini dapat dimanfaatkan oleh BUMN untuk lebih memahami dunia wartawan, ketika mereka hadir saat hadir di UKW untuk bersilaturahmi baik yang di pusat maupun perwakilannya di daerah," ujarnya.

Sebagai tradisi tahunan, PWI akan menggelar Hari Pers Nasional (HPN) pada 9 Februari 2024. Sebelum acara puncak, pada tanggal 7 Februari 2024 akan digelar beberapa seminar dan konvensi, juga dilaksanakan konferensi kerja nasional PWI. ● ber



Pj. Walikota Serang, Yedi Rahmat



PEMERINTAH KOTA SERANG DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



Sekretaris Daerah Kota Serang, Nanang Saefudin

Bangun Ekonomi Syariah, Pemkot Serang Resmikan Zona KHAS Pasar Lama



Pemerintah Kota Serang bersama Bank Indonesia (BI) serta Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Banten (KDEKS) Banten telah resmi meluncurkan wisata kuliner "Katuran Dahar" Kawasan Kuliner Pasar Lama menuju ploting zona kuliner halal dan sehat (KHAS) dan penguatan-penguatan digitalisasi pada Senin Malam (18/12).

Dengan slogan "Kota Serang Terang Benderang" Penjabat (Pj) Walikota Serang, Yedi Rahmat menyampaikan bahwa keberadaan wisata kuliner ini, diharapkan dapat menghilangkan stigma Pasar Lama yang dahulu terkesan suram dan berantakan, kini menjadi terang dan ramai. Dengan begitu, lanjutnya, keberadaan wisata kuliner ini dapat meramaikan kembali Pasar Lama, yang sempat mati suri. "Seperti yang kita ketahui, beberapa tahun yang lalu sebelum

adanya wisata kuliner ini, Pasar Lama ini sedikit kumuh seperti apa yang disampaikan tadi, tapi kini sesuai dengan penataan kota lebih baik, dan saya senang cari makan setiap malam ketika mencoba makan disini ternyata makanannya enak-enak," ungkapnya.

Lebih lanjut Yedi menyampaikan, pihaknya sangat mengapresiasi pada pihak-pihak yang telah mendorong terciptanya kawasan wisata kuliner malam pasar lama Kota Serang. "Alhamdulillah masyarakat antusias adanya wisata kuliner malam pasar lama ini. Selain kulinernya enak-enak, pembayarannya juga sudah tersedia digitalisasi melalui QRIS. Kedepannya, nanti kita akan sediakan toilet berjalan yang memang belum ada," tutupnya.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Perwakilan BI Provinsi Banten, Imaduddin Sahabat, dalam sambutannya menyampaikan, BI Provinsi Banten akan terus mendukung program pengembang-

an ekonomi halal dan mendorong potensi ekonomi daerah dalam pembangunan konsumen rumah tangga.

"Kami sampaikan ekonomi halal ini juga membangun keuangan halal atau syariah.

Dijelaskannya, BPS mencatat UMKM di Banten 420 ribu dan 60 persen pada umum-

nya di industri makanan halal. Untuk itu, katanya, penting dibangun zona KHAS di setiap wilayah, sebagai bagian dari undang undang jaminan produk halal untuk produknya agar tersertifikasi halal. "Kita bangun sampai pada titik semua pedagang disini halal menjadi zona kuliner halal, se-

hat di Pasar Lama dan pertama di Provinsi Banten. Sehingga Banten menjadi terdepan," ujar Imaduddin Sahabat.

Dengan disatukannya para UMKM di kawasan Katuran Dahar ini, Imaduddin berharap adanya koneksi menjadi destinasi pusat kuliner halal dan pusat wisata

dari Banten Lama.

Sementara itu, Ketua KDEKS Banten, Siti Marifah Ma'ruf Amin, dalam peluncuran Katuran Dahar menyampaikan, Banten merupakan Provinsi yang terkenal dengan daerah tingkat keagamaan yang sangat kuat sejak dulu sehingga bisa menjadikan eko-

system syariah.

Menurutnya, sertifikasi halal ini wajib ada karena ini sudah merupakan mandatori undang-undang produk halal. "Saat ini tidak lagi voluntry (lembaga) untuk melabelisasi sertifikasi halal. Untuk itu KDEKS berusaha mendukung mengenai ekonomi syariah dan produk halal. Kita lihat harusnya Indonesia peringkat baik untuk halal dunia. Menjadikan Indonesia acuan halal dunia dalam mengembangkan kawasan zona khas mungkin pariwisata," ujarnya.

Siti Marifah juga menyampaikan, pimpinan daerah harus menjelaskan kepada masyarakat dalam literasi sertifikasi Halal agar terwujudnya ekonomi syariah. "Selain sertifikasi Halal, KDEKS juga mendorong digitalisasi dalam pengembangan untuk mempromosikan wisata kuliner dengan media sosial," pungkasnya. ● Adv